

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pengendalian internal dan *good government governance* serta risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dengan subjek penelitiannya Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh pengendalian internal dan *good government governance* terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

3.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Garut

Kabupaten Garut berasal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendels. Kabupaten Limbangan dibubarkan dengan alasan merosotnya produksi kopi hingga menyentuh titik paling rendah dan bupati menolak perintah menanam nila (*indigo*). Pada 16 Februari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang dijabat oleh Raffles, mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan di wilayah Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan karena daerah tersebut dinilai sempit.

Hal tersebut membuat Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok untuk Ibu Kota Kabupaten.

Awalnya panitia menemukan daerah Cimurah yang berlokasi sekitar 3 km sebelah timur Suci. Akan tetapi, ditempat itu susah mendapatkan air bersih. Sehingga, daerah cimurah gagal menjadi ibu kota baru. Selanjutnya, panitia mencari lokasi baru ke barat Suci. Setelah menempuh sekira 5 km, mereka menemukan daerah yang dinilai cocok sebagai Ibu Kota Kabupaten yang memiliki tanah subur, memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk dan memiliki pemandangan yang indah dikelilingi Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (Maranatha), tangan seorang panitia “kakarut” tergores hingga berdarah. Dalam rombongan panitia, seorang Belanda bertanya “Mengapa berdarah?”. Orang yang tergores menjawab “Tangannya kakarut”. Orang Eropa tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi “gagarut”.

Pada saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan “Ki Garut” dan telaganya dinamai “Ci Garut”. Lokasi telaga itu sekarang ditempati bangunan SLTP I, SLTP II, dan SLTP IV Garut. Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah itu akhirnya dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut direstui Bupati Adipati Adiwijaya untuk kemudian dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan.

Pada 15 September 1813, dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen,

masjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat Babancong yang menjadi tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato dihadapan publik. Setelah tempat tersebut dibangun, Ibu Kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut pada 1821. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral No. 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota di Garut Kota pada 1 Juli 1913. Saat itu, bupati yang sedang menjabat adalah RAA Wiratanudatar (1871-1915). (garutkab.go.id)

3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Garut

Visi Pemerintah Kabupaten Garut 2019-2024 “Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut:

1. Bertaqwa

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

2. Maju

Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat

memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

3. Sejahtera

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Misi dari Pemerintah Kabupaten Garut yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah disertai tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

3.1.3 Letak Geografis Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di

Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7 °45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administrative sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km²) dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
2. Timur : Kabupaten Tasikmalaya
3. Selatan : Samudra Indonesia
4. Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Garut terdiri dari 42 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 421 Desa.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki spesifikasi sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dari awal penelitian

hingga pembuatan desain penelitiannya (Sandu & Ali, 2015:19). Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk memahami apa yang terdapat dibalik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut (Sandu & Ali, 2015:90).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015:45) variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai seseorang, faktor, perlakuan terhadap suatu objek atau kegiatan yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* terhadap Risiko *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)”. Maka terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengendalian Internal sebagai X_1 dan *Good Government Governance* sebagai X_2 . Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Risiko *Fraud* sebagai Y . Definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengendalian Internal (X ₁)	Pengendalian Internal adalah proses yang intrgral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai denga tujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian	a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang terikat a. Identifikasi risiko b. Analisis risiko a. Reviu atas kinerja Instansi.pemerintah yang bersangkutan.	Interval

- b. Pembinaan SDM
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Pengendalian fisik atas aset.
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi.
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan pencatatannya.
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - j. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan
- a. Evaluasi terpisah

			<ul style="list-style-type: none"> b. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit. c. Reviu temuan atas kelemahan. 	
<i>Good Government Governance</i> (X ₂)	<i>Good Government Governance</i> yaitu penyelenggaraan manajemen secara profesional, transparan, akuntabel dan adil, serta sesuai dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien dan pemerintahan yang baik dalam pembangunan yang kokoh dan bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi 2. Transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilihan penyelenggara negara berdasar kesadaran dan pemahaman politik. b. Pemilihan penyelenggara negara berdasar kepentingan negara dan masyarakat. c. Penyelenggara negara mampu mengayomi rakyat. d. Peraturan disusun mengikutsertakan masyarakat. e. Peraturan disusun dengan mewujudkan kepentingan umum. f. Menerapkan prinsip transparansi. a. Disediaknya informasi penyusunan peraturan. b. Peraturan diumumkan secara terbuka. c. Tersedia informasi mengenai proses penetapan peraturan. 	Interval 1

- d. Tersedia informasi rencana, proker, anggaran.
 - e. Pengawasan informasi oleh masyarakat.
3. Akuntabilitas
- a. Penetapan fungsi, tugas dan wewenang sesuai visi, misi, tujuan
 - b. Pemerintah memiliki ukuran kinerja.
 - c. Pelaksanaan tugas secara jujur
 - d. Pertanggungjawaban disampaikan secara berkala.
 - e. Menindaklanjuti pengaduan
4. Budaya Hukum
- a. Peraturan disusun dengan asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan HAM.
 - b. Peraturan mengandung nilai yang mendukung supermasi hukum.
 - c. Pelaksanaan peraturan dengan menghindari KKN.
 - d. Memastikan berfungsinya lembaga hukum.
 - e. Memberi sanksi atas pelanggaran.
- a. Pelaksanaan peraturan

5. Kewajaran dan Kesetaraan
- a. mengutamakan HAM.
 - b. Pelaksanaan pelayanan berbasis kewajaran dan kesetaraan.
 - c. Penyusunan standar pelayanan diselenggarakan memperhatikan lingkungan.
 - d. Pengawasan pelaksanaan standar pelayanan
 - e. Menerapkan kebijakan rekrutmen.

<p>Risiko <i>Fraud</i> (Y)</p>	<p>Risiko kecurangan berhubungan dengan peristiwa atau kondisi yang berindikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau adanya peluang untuk melakukan kecurangan.</p>	<p>1. Tekanan</p> <p>2. Kesempatan</p> <p>3. Rasionalisasi</p>	<p>a. Tekanan keuangan. Interval</p> <p>b. Tekanan non keuangan.</p> <p>c. Tekanan organisasi</p> <p>a. SPI yang lemah</p> <p>b. Tidak mampu menilai kualitas kerja.</p> <p>c. Tidak ada akses terhadap informasi</p> <p>d. Gagal memberi sanksi pada pelaku <i>fraud</i>.</p> <p>e. Lalai terhadap tugas dan kewajiban.</p> <p>f. Kurang atau tidak adanya jejak audit</p> <p>a. Mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja.</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- b. Merasa sudah
berbuat banyak
kepada organisasi
- c. Menganggap
bahwa yang
diambil tak
seberapa.
- d. Dianggap hanya
sekedar meminjam
dan akan
dikembalikan.

Sumber: Data Olahan Peneliti

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner berskala likert data yang diperoleh dari skala tersebut adalah berupa data interval (Sugiyono, 2013:96). Kuesioner ini diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dalam bentuk pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013:96). Skala likert dalam penelitian ini menggunakan skor dari 1 hingga 5.

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diambil secara langsung dari yang memberikan data (Sugiyono, 2013:137). Data yang digunakan berasal dari penyebaran kuesioner pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Kuesioner tersebut berupa pertanyaan mengenai pengendalian internal, *good government governance*, dan risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah suatu bidang yang digeneralisasikan dari objek/subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Garut. Rekap data Desa berdasarkan Kecamatannya terdapat pada lampiran 2.

Pertimbangan dalam menentukan populasi ini karena Kabupaten Garut merupakan daerah dengan anggaran Dana Desa dengan anggaran terbesar ke-dua di Indonesi pada tahun 2019. Dengan dana yang disalurkan pada tahun 2019 mencapai Rp 509.491.067.000. Setiap Desa akan menerima kurang lebih Rp 662.806.000. Oleh karena itu, rencana kerja pemerintah memerlukan pengelolaan keuangan yang baik, Alasan kedua karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut mendapatkan Terbaik Pertama dalam Penilaian Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 (Direktorat Jendral Pembendaharaan, 2022).

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki jumlah dan sifat-sifat tertentu atau menggambarkan sejumlah kecil anggota populasi menurut prosedur tertentu, sehingga mereka dapat mewakili populasi (Sandu dan Ali, 2015:55-56). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster*.

Cluster sampling (Area sampling) merupakan teknik yang dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi atau dari suatu kabupaten (Sandu dan Ali, 2015:57). Teknik ini digunakan karena subjek dari penelitian ini yaitu 30 Desa yang berada di Kabupaten Garut.

Cluster Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *multistages cluster random sampling* dimana teknik penarikan sampel banyak tahap. Tahap pengambilan sampel yang dilakukan yaitu:

1. Tahap I

Pada tahap I peneliti memilih sampel daerah dari populasi daerah. Teknik sampling yang digunakan pada tahap ini adalah *sampling aksidental*. Menurut (Priyono, 2008:118), teknik pengambilan sampel dengan *sampling aksidental* yaitu didasarkan pada kemudahan (*convenience*). Sampel dipilih karena berada pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat. Mengambil sampel ini berdasarkan pada ketidakmungkinan untuk menjangkau tempat penelitian yang sangat luas. Jumlah

sampel dalam penelitian ini didasarkan pada ukuran sampel lebih dari 30 orang dan kurang dari 500 merupakan jumlah sampel yang tepat pada kebanyakan penelitian. Ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (pada umumnya 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 30 sampel yang berasal dari 3 variabel (2 variabel dependen dan 1 variabel independen) dikali 10. Nama Kecamatan, dan Desa disajikan pada tabel:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Kecamatan	Desa
1.	Tarogong Kaler	Desa Cimaganten, Desa Jati, Desa Langensari, Desa Mekarjaya, Desa Mekarwangi, Desa Panjiwangi, Desa Pasawahan, Desa Rancabango, Desa Simajaya, Desa Sukajadi, Desa Sukawangi, Desa Tj. Kamuning.
2.	Tarong Kidul	Desa Cibunar, Desa Haurpanggung, Desa Jayaraga, Desa Kersamenak, Desa Mekargalih, Desa Sukabakti, dan Desa Tarogong
3.	Kecamatan Sucinaraja	Desa Linggamukti, Desa Sadang. Desa Tegalpanjang, Desa Tenjonagara, dan Desa Sukaratu

4.	Kecamatan Wanaraja	Desa Cinunuk, Desa Sindangprabu, Desa Sindangratu, Desa Wanajaya, Desa Wanamekar, dan Desa Wanasari
----	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data Olahan Peneliti

2. Tahap II

Pada tahap II peneliti memilih sampel individu/sampel subjek dari setiap sampel daerah yang terpilih pada tahap I. Teknik sampling yang digunakan pada tahap ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama terhadap orang-orang yang dianggap ahli (Priyono, 2008:118). Dengan demikian sampel pada penelitian ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tiga puluh Desa yang berada di Kabupaten Garut. Pertimbangan dalam memilih sampel ini karena BPD berkedudukan di pihak masyarakat. BPD juga memiliki tugas untuk mengawasi eksekutif desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. BPD juga memiliki tugas bersama Kepala Desa membuat anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.

Pengambilan sampel dari populasi pada tiga puluh Desa di Kabupaten Garut yaitu sebanyak 270 orang, karena jumlah BPD pada setiap Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa adalah sebanyak 5-9 orang. Sehingga jumlah populasi pada 30 Desa di Kabupaten Garut yaitu 9 orang x 30 Desa = 270 orang.

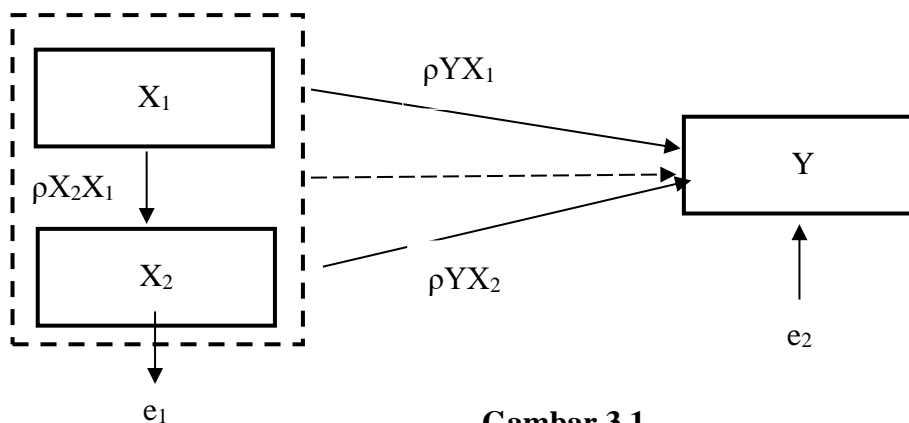
Menurut (Arikunto, 2006) jika responden < 100, semuanya dijadikan sampel. Bila responden > 100, sampel yang diambil 10%-15% atau 20%-25%. Sebaliknya, jika subjeknya terlalu besar, sampel dapat diambil 10%-15%, hingga 20%-25% atau lebih, berdasarkan pada:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana,
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data,
3. Jumlah risiko yang diambil peneliti. Untuk penelitian yang berisiko tinggi, tentunya sampelnya besar dan hasilnya akan lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 270 Badan Permasyarakatan Desa. Maka $25\% \times 270 = 67,5$ atau dibulatkan menjadi 68 responden. Untuk menghindari kuesioner yang tidak terisi maupun kesalahan dalam pengisian kuesioner maka peneliti menambah jumlah sampel menjadi 90 responden. Sehingga kuesioner disebar ke 3 BPD pada setiap desa di 30 Desa di Kabupaten Garut.

3.2.4 Model Penelitian

Penelitian ini terdiri atas variabel independent yaitu pengendalian internal (X_1), *good government governance* (X_2) serta variabel dependen yaitu risiko *fraud* (Y). Maka model penelitian disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Model Penelitian

Keterangan:

—————> : Pengaruh secara parsial

- - - - -> : Pengaruh secara simultan

X_1 : Pengendalian Internal

X_2 : *Good Government Governance*

Y : Risiko *Fraud*

$\rho_{X_2X_1}$: Koefisien jalur variabel X_1 terhadap X_2

ρ_{YX_1} : Koefisien jalur variabel X_1 terhadap Y

- ρ_{YX_2} : Koefisien jalur variabel X_2 terhadap Y
 $\rho_{Y\varepsilon}$: Koefisien jalur variabel ε terhadap Y
 e_1 : Faktor yang tidak diteliti terhadap variabel X_2
 e_2 : Faktor yang tidak diteliti terhadap variabel Y

3.2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang pada penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang sudah ditentukan dalam proposal (Sugiyono, 2013:243). Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan statistic untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* terhadap Risiko *Fraud*.

3.2.5.1 Uji Kualitas Data

Dalam menguji kualitas data, penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh dan digunakan pada penelitian ini serta data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbebas dari bias secara statistik.

1. Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid apabila adanya kesamaan antara data yang telah terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:121). Uji validitas dilakukan sebelum kuisisioner diberikan kepada responden agar diperoleh data penelitian yang valid. Kuisisioner dapat

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi yaitu dihitung dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Jika r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 0,05 dan nilai positif maka pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2013:124) Reliabel digunakan untuk mengukur berkali-kali dengan hasil data yang sama (konsisten). Uji reliabilitas ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah reliabel atau tidaknya suatu variabel dengan dilakukan uji statistik dengan melihat *Cronbach Alpha* (α). Variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS (Ghozali, 2013).

2.2.5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menggeneralisasi (Sugiyono, 2013:147). Statistik deskriptif dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel itu diambil. Data yang akan digunakan dalam statistik ini jenis datanya harus diperhatikan terlebih dahulu. Fungsi dari statistik deskriptif ini yaitu dapat mengklasifikasikan variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sebelumnya belum teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang membutuhkan tentang keadaan variabel tersebut. Statistik deskriptif juga berfungsi sebagai penyaji informasi sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan (Sandu dan Ali, 2015:91-92).

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian untuk melihat layak atau tidaknya suatu model dianalisis. Uji asumsi klasik ini merupakan pengujian terhadap asumsi statistik yang harus dipenuhi dalam persamaan regresi agar dapat dilaksanakan dengan baik (sebagai uji persyaratan analisis):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2013:160). Uji normalitas yang digunakan adalah analisis *Kolmogrov Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 yang mana bisa dikatakan normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, dan *Variance Inflating Factor* (VIF). Berdasarkan nilai *tolerance*, jika nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Dilihat dari VIF, jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013:105).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians residual yang diamati. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan cara uji *glejser* yang ditunjukkan untuk meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residual. Adanya indikasi heteroskedastisitas dapat dilihat jika variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen atau jika varian residual tetap. Jika tidak adanya masalah heteroskedastisitas dilihat apabila nilai signifikan antara varian residual independen dengan nilai absolut residualnya lebih dari 0,05 atau apabila varian residual suatu pengamatan lain berbeda (Ghozali, 2013:139).

3.2.5.4 Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui besar pengaruh secara langsung dari Pengendalian Internal (X_1) terhadap Risiko *Fraud* (Y), *Good Government Governance* (X_2) terhadap Risiko *Fraud* (Y), dan Pengendalian Internal (X_1) terhadap *Good Government Governance* (X_2). Diagram jalur untuk menguji pengaruh antara pengendalian internal dan *good government governance* terhadap risiko *fraud* terdapat pada gambar 3.1.

Dalam gambar 3.1 dapat diformulasikan ke dalam dua persamaan struktur sebagai berikut:

Persamaan Jalur Struktur Pertama:

$$X_2 = \rho_{X_1X_2} X_1 + e_1$$

Persamaan Jalur Struktur Kedua:

$$Y = \rho_{YX_1} X_1 + \rho_{YX_2} X_2 + e_2$$

Analisis korelasi dan regresi merupakan dasar dari perhitungan koefisien jalur, langkah-langkah menguji analisis jalur (*path analysis*) sebagai berikut:

1. Koefisien Beta

Koefisien beta digunakan untuk mengetahui kekuatan masing-masing variabel independen dalam menentukan variabel dependen. Tujuan dari uji beta ini adalah

untuk mengetahui variabel independen mana yang memiliki pengaruh dominan atau terbesar terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2016:100), ada dua hal yang harus diperhatikan saat menggunakan *standardized* beta. Pertama, gunakan koefisien beta untuk melihat kepentingan relatif dari masing-masing variabel independen, dan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Kedua, nilai koefisien beta hanya dapat diinterpretasikan dalam konteks variabel lain dalam persamaan regresi. Nilai koefisien beta dalam SPSS dapat dilihat dalam *Standardized Coefficients Beta*.

2. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama antara variabel eksogen terhadap variabel endogen yang dijelaskan dalam persamaan jalur. Nilai koefisien determinasi persamaan jalur yang semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa semakin banyak keragaman variabel eksogen terhadap variabel endogen yang dapat dijelaskan dalam persamaan jalur tersebut. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai mendekati satu berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3. Koefisien Residu

Koefisien residu adalah besarnya pengaruh variabel lain di luar model yang tidak ikut diamati. Koefisien residu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\varepsilon_y = \sqrt{1 - R^2}$$

3.2.5.5 Uji Hipotesis

Analisis uji hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh hipotesis penelitian yang telah disusun oleh peneliti yang dapat diterima berdasarkan data yang telah dikumpulkan, hasil dari analisa ini yaitu menguji apakah hipotesis dapat diterima atau hipotesis ditolak berdasarkan hipotesis yang telah diajukan. Analisis uji hipotesis ini bukan untuk menguji kebenaran hipotesis (W. Gulo, 2002). Dalam pengujian hipotesis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai-berikut:

1. Penetapan hipotesis operasional

a. Secara parsial.

$H_{01} : \rho_{YX_1} = 0$: Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Risiko *Fraud*

$H_{a1} : \rho_{YX_1} < 0$: Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Risiko *Fraud*

$H_{02} : \rho_{YX_2} = 0$: *Good Government Governanve* tidak berpengaruh terhadap Risiko *Fraud*

$H_{a2} : \rho_{YX_1} < 0$: *Good Government Governance* berpengaruh negatif terhadap Risiko *Fraud*

$H_{03} : \rho_{X_2X_1} = 0$: Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap *Good Government Governance*

$H_{a3} : \rho_{X_2X_1} > 0$: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap *Good Government Governance*

b. Secara Simultan.

$H_{04} : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$: Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap Risiko *Fraud*

$H_{a4} : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \neq 0$: Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Risiko *Fraud*

2. Penetapan Tingkat Keyakinan

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan tingkat keyakinan sebesar 95% dengan titik kritis atau alpha (α) sebesar 5%.

3. Penetapan Signifikansi

a. Secara Parsial (Uji T)

Untuk menguji signifikansi secara parsial digunakan uji t. Uji T merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1, X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji T dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-(k+1)}{1-r^2}}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

r = nilai korelasi parsial

k = jumlah variabel independen

b. Secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui signifikansi secara simultan digunakan uji f. Uji F berfungsi untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2}{k-(1-R^2)}$$

Dimana:

R^2 = koefisien korelasi ganda

k = banyaknya variabel independen

n = jumlah anggota sampel

4. Kaidah Keputusan

a. Secara Parsial

Terima H_0 jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dan H_a ditolak artinya tidak signifikan.

Tolak H_0 jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, dan H_a diterima artinya signifikan.

b. Secara Simultan

Terima H_0 jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, dan H_a ditolak artinya tidak signifikan.

Tolak H_0 jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, dan H_a diterima artinya signifikan.

5. Kesimpulan

Proses membandingkan hasil pengujian terkait diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.